

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS TENAGA LISTRIK PASKABAYAR (REGULER) DALAM UPAYA MENDUKUNG PENGENDALIAN INTERN PERUSAHAAN (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota)

**Virgy Ayu Kandita
Muhammad Saifi
I Nengah Sudjana**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
Email : virgykandita@gmail.com

ABSTRACT

This research has purpose to know the implementation of system and saleprocedures and postpaid power cash receipt(regular) at PT. PLN (Persero) Rayon Kediri City and to know the effectiveness of system and saleprocedures and cash receipts to support internal control at PT. PLN (Persero) Rayon Kediri City. The research method is used descriptive research type through qualitative approach. Descriptive research through qualitative approach has a goal to get the concept in detail and the detailed on the problems that occur in system and saleprocedures and cash (post-paid)receipts. Based on the resultsof the analysis and discussion, there is weakness that affect the effectivenessof internal control within the company that In the implementation of meter reading online through the recording of ACMT application so there are no records or documents to support the meter recordof implementation. On the payment noticeof letter is addressed to the customers who are arrearsed paymentexperienceonly in the first month and thirdmonthwith the policy of temporary power cut-off until dismantling completion of MCB postpaid subscribers (regular).

Keywords :System Analysis And Sales Procedures, And Cash Receipts, Internal Control, PT. PLN (Persero) Rayon Kediri City.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik paskabayar (reguler) pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota serta untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas dalam upaya mendukung pengendalian intern pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran secara detail dan rinci terhadap masalah yang terjadi pada sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik paskabayar (reguler). Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, terdapat kelemahan yang mempengaruhi keefektifan pengendalian intern di dalam perusahaan yaitu Pada pelaksanaan pembacaan meter dilakukan secara online melalui pencatatan aplikasi ACMT sehingga tidak adanya catatan atau dokumen yang mendukung pelaksanaan pencatatan meter. Pada surat pemberitahuan pembayaran yang ditujukan pada pelanggan yang mengalami penunggakan pembayaran dilaksanakan hanya pada tunggakan bulan 1 dan tunggakan bulan 3 dengan kebijakan pemutusan sementara tenaga listrik hingga pembongkaran rampung MCB pelanggan paskabayar (reguler).

Kata Kunci : Analisis Sistem Dan Prosedur Penjualan, Dan Penerimaan Kas, Pengendalian Intern, PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota.

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan listrik yang semakin tinggi diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat pula, maka permintaan pasokan listrik tentunya juga meningkat. Pentingnya pasokan listrik menjadi tugas pemerintah dalam mengelola dan mengatur kebutuhan masyarakat di bidang tenaga listrik. Kepentingan listrik saat ini dikuasai pemerintah dalam bentuk (Badan Usaha Milik Negara) BUMN. Kebijakan tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik secara efektif dan efisien serta merata bagi masyarakat Indonesia agar tetap terjaganya fungsi (Badan Usaha Milik Negara) BUMN dan mencegah terjadinya monopoli yang berkaitan dengan tujuan kepentingan tersebut.

Di Indonesia, perusahaan resmi yang ditunjuk pemerintahan sebagai perusahaan jasa yang bergerak dibidang ketenagalistrikan dikuasai oleh PT. PLN (Persero). Perusahaan Listrik Negara ini merupakan perusahaan dengan keeksistensinya di bidang ketenagalistrikan yang berada dibawah naungan organisasi publik, sehingga PT. PLN (Persero) dituntut mampu menunjukkan profesionalismenya dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia. Pelayanan publik tersebut tentunya menjadi tugas PT. PLN (Persero) untuk mempertahankan citra yang baik di mata publik.

PT. PLN (Persero) pusat maupun daerah pada saat ini, menjual program listrik serta berbagai pelayanan jasa yang dilihat dari mekanisme pembayaran yaitu penjualan tenaga listrik Prabayar dan penjualan listrik Paskabayar. Pelayanan jasa pada Perusahaan Listrik negara yang dilihat secara sistematis menyediakan pelayanan antaralain ; Pelayanan pemasangan Listrik Prabayar, Pemasangan Listrik Paskabayar, Pelayanan Migrasi Listrik, Pelayanan Permintaan Perubahan Daya, Pelayanan Permintaan Perubahan Nama Pelanggan, Pelayanan Permintaan Golongan Tarif, dan Permintaan Penyambungan Sementara serta Pelayanan Pasang Baru.

Pada Kenyataannya sebagian besar masyarakat menggunakan listrik paskabayar yaitu listrik yang dapat dikonsumsi tanpa harus membayarnya terlebih dahulu. Pembayaran pada listrik paskabayar akan ditagihkan oleh penyedia layanan pada waktu yang telah ditetapkan yaitu setiap 30 hari atau 1 bulan setelah pemakaian listrik. Pelunasan pembayaran oleh pelanggan adalah selama tanggal 1 sampai tanggal 20 di setiap bulannya. Apabila tidak dilakukan pelunasan

pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, pihak PLN berhak memberikan denda yaitu berupa biaya keterlambatan sesuai dengan tarif dan jenis daya yang dikonsumsi, serta akan dilakukan pemutusan sementara apabila tidak dilakukan pelunasan tagihan pada jatuh tempo yang telah ditentukan hingga akan dilakukan pembongkaran rampung sambungan listrik pelanggan apabila terbukti adanya penunggakan selama 3 bulan.

Pada listrik paskabayar pembayaran dilakukan tidak dengan pembayaran secara langsung, melainkan dengan pembayaran yang ditangguhkan. Bagi perusahaan, pembayaran yang ditangguhkan merupakan suatu piutang yang nantinya akan menimbulkan klaim terhadap konsumen agar bersedia membayar sejumlah uang sebagai kontribusi jasa yang telah diterima dari PLN pada jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi pelanggan, pembayaran dilakukan secara tidak langsung ketika barang atau jasa itu tersedia, akan tetapi pembayaran terjadi ketika jasa atau pasokan listrik tersebut telah dikonsumsi

Faktor non teknis berkaitan dengan jumlah tagihan listrik, dimana jumlah tagihan listrik yang ditagihkan pada waktu jatuh tempo terjadi penurunan tagihan atau jumlah tagihan yang tidak wajar sehingga terjadi ketidaksesuaian terhadap pencatatan administrasi di dalam perusahaan. Penyebab dari terjadinya faktor non teknis adalah pencurian listrik terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dan kerusakan pada alat kWh meter / MCB (*Mini Circuit Breaker*). Tunggakan dan pencurian meter / pemakaian listrik secara ilegal merupakan pelanggaran yang seringkali terjadi pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota. Pelanggaran tersebut telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1846.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Faktor teknis juga menjadi permasalahan yang sering terjadi. Permasalahan tersebut berasal dari lapangan yaitu diakibatkan karena faktor faktor teknis yang tidak bisa dielakkan seperti kerusakan trafo pada gardu gardu wilayah tertentu yang salah satunya disebabkan oleh umur trafo atau kelebihan kapasitas daya tampung listrik dan faktor sejumlah angka listrik yang hilang karena terdapat sebagian dari pelanggan yang melakukan kecurangan dengan menikmati pasokan listrik ilegal. Persentase jumlah susut yang disebabkan oleh faktor teknis adalah sebesar 6%.

Suatu pengendalian internal yang tepat dengan fungsi pengendalian internal dengan tujuan menurut Baridwan (2012:13) yaitu untuk menjaga

keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu. Pengendalian Internal tersebut diharapkan mampu menunjang sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik paskabayar (reguler) khususnya pada PT. PLN (Persero) rayon Kediri Kota.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pengertian Sistem dan prosedur

Menurut Cole dalam Baridwan (2012:3), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan definisi prosedur menurut Mulyadi (2016:4) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi di dalam perusahaan bisnis memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan khususnya pada proses akhir pada transaksi keuangan. Melihat begitu pentingnya peran sistem akuntansi pada perusahaan, maka sangat diperlukannya sistem akuntansi yang berjalan baik dan sehat. Menurut Ranatarisza (2013:6) sistem akuntansi adalah pengorganasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang dalam hal ini adalah jurnal, dan laporan dari masing – masing bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen.

Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan umum dari pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) menyatakan bahwa tujuan pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
- c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu memperbaiki tingkat

keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai petanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

- d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2.2. Listrik Paskabayar

Pengertian Listrik Paskabayar

Pasca (Setelah) Bayar Artinya Setelah digunakan baru dapat dibayar, Jika kita contohkan pada PLN Pascabayar Adalah listrik PLN yang dapat kita gunakan tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, Pembayaran tagihan pemakaian akan dilakukan setelah tanggal atau waktu penggunaan yang ditetapkan oleh pihak penyedia layanan. (<http://www.pln.co.id/ntb/?p=108>).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Listrik paskabayar (Reguler) merupakan pembayaran yang dilakukan konsumen setelah pemakaian listrik. Pencatatan dilakukan oleh petugas PLN untuk mengetahui seberapa besar energi listrik yang telah dikonsumsi untuk kemudian diterbitkan rekening sebagai pengantar penagihan terhadap konsumen.

Keuntungan Listrik Paskabayar (Reguler)

- a. Tidak ada batas lama pemakaian listrik, listrik selalu tersedia sampai tenggat waktu akhir bulan.
- b. Listrik tersedia sebelum sebelum adanya pembayaran dari konsumen.
- c. Listrik yang digunakan tak terhingga.
- d. Kwh meter (dak) lebih tahan lama (PLN, 2016).

2.3. Sistem dan Prosedur Penjualan

Pengertian Prosedur Penjualan

Puspitawati dan Anggadini (2016:165) berpendapat bahwa Penjualan merupakan aktivitas memperjualbelikan barang dan jasa kepada konsumen. Siklus penjualan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa tersebut, (Krismiaji, 2002:269). Hal ini berkaitan dengan pendapat prosedur penjualan yang di kemukakan Baridwan (2012:109) yang menyatakan bahwa prosedur penjualan merupakan urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur (penagihan) dan pencatatan penjualan.

Unit yang terkait dalam sistem Penjualan

Menurut Baridwan (2012: 109) menyatakan bahwa Prosedur penjualan melibatkan

beberapa bagian dalam perusahaan dengan maksud agar penjualan yang terjadi dapat diawasi dengan baik. Bagian – bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tersebut adalah:

- a. Bagian Pesanan Penjualan (*Sales Order Departement*)
- b. Bagian Kredit
- c. Bagian Gudang
- d. Bagian Pengiriman
- e. Bagian Billing (pembuatan faktur dan penagihan)

Pengendalian Internal atas Penjualan

- 1.) Pada struktur organisasi, fungsi yang harus terpisah dilakukan kegiatan pengecekan intern terhadap penjualan dengan adanya kemungkinan resiko buruk yang dapat terjadi, misalnya piutang tak tertagih, manipulasi catatab akuntansi, dan resiko lainnya,
- 2.) Pada prosedur pembukuan, setiap terjadi transaksi penjualan, prosedur pencatatan pencatatan berguna untuk terjaminnya harta perusahaan dan sebagai bukti telah terjadi transaksi penjualan,
- 3.) Pada komponen praktek sehat, perusahaan harus memiliki aturan dalam pelaksanaan proses penjualan misalnya formulir dengan nomor urut yang tercetak, pelaksanaan rekonsiliasi secara periodik, dan kegiatan praktek sehat lainnya (Mulyadi, 2001:220)

2.4. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas **Pengertian Prosedur Penerimaan Kas**

Penerimaan kas merupakan suatu penjualan tunai berupa pembayaran secara langsung ketika terjadinya transaksi. Menurut Mulyadi (2001:455) berpendapat bahwa penjualan Tunai merupakan pembeli yang harus membayar harga barang sebelum menerima barang dari perusahaan dan setelah perusahaan menerima uang dari pembeli, perusahaan mencatat transaksi penjualan tunai tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem prosedur penerimaan kas merupakan serangkaian proses transaksi pembayaran yang dilakukan dari konsumen berupa pembayaran tunai untuk mendapatkan barang atau jasa hingga pada proses pencatatan penjualan tunai perusahaan.

Fungsi yang Terkait Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas

Menurut Mulyadi (2016:385) menyatakan bahwa fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah Fungsi

Penjualan, Fungsi Kas, Fungsi Gudang, Fungsi Pengiriman dan Fungsi Akuntansi

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penerimaan kas

Menurut Mulyadi (2016:392-393), prosedur pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut:

1. Prosedur order penjualan.
2. Prosedur penerimaan kas.
3. Prosedur penyerahan barang.
4. Prosedur pencatatan penjualan tunai.
5. Prosedur penyetoran kas ke bank
6. Prosedur pencatatan penerimaan kas.
7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.

Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas

Berikut merupakan tanggung jawab pengendalian internal terhadap kas, sebagai berikut:

- a. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik.
- b. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup.
- c. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuat surat tentang cek atau uang yang diterima, dari siapa, jumlahnya, dan untuk tujuan apa.
- d. Semua penjualan tunai harus dibuatkan nota penjualan yang sudah diberi nomor urut atau dicatat dalam mesin *cash register*.
- e. Daftar penerimaan uang harus dicocokkan dengan jurnal penerimaan uang.
- f. Tembusan nota penjualan tunai harus dikirimkan ke kasir dan bagian pengiriman.
- g. Bukti setor ke bank setiap hari dicocokkan dengan daftar penerimaan uang harian dan catatan dalam jurnal penerimaan uang.
- h. Kasir tidak boleh merangkap merangkap mengerjakan buku oembantu utang dan piutang dan sebaliknya.
- i. Semua penerimaan uang harus disetorkan pada hari itu juga atau pada awal hari kerja berikutnya.
- j. Rekonsili laporan bank harus dilakukan oleh orang yang tidak berwenang menerima uang maupun yang menulis cek.
- k. Kunci cash register harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola kas.
- l. Diadakan rotasi pegawai agar tidak timbul kerja sama untuk berbuat kecurangan.
- m. Kasir sebaiknya menyerahkan uang jaminan. (Wardani, 2014 : 4)

2.5. Pengendalian Internal

Pengertian Pengendalian Internal

Menurut pendapat AICPA (*Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant*) dalam Baridwan (2012:13) pengawasan Intern (*Internal control*) atau yang disebut Pengendalian Internal itu meliputi struktur organisasi dan semua cara – cara serta alat – alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian Internal menurut Mulyadi (2016:129) adalah: (1) menjaga aset organisasi, (2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Unsur – Unsur Pengendalian Internal

Unsur-unsur pengendalian Internal yang dikemukakan Mulyadi (2016:130) yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian pada skripsi ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian dilakukan berdasarkan pedoman observasi, pedoman interview, pedoman dokumentasi, catatan lapangan dan peneliti sendiri. Langkah – langkah didalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik pascabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota terhadap

sistem yang lama dalam rangka mengevaluasi kelemahan yang terjadi pada internal perusahaan.

2. Membangun sistem yang baru sebagai solusi dalam sistem yang lama dalam upaya pengendalian intern pada perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis dan Interpretasi data atas sistem penjualan tenaga listrik paskabayar (reguler) pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota.

Berdasarkan penelitian atas data yang diperoleh mengenai sistem penjualan tenaga listrik paskabayar yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota perlu adanya kontribusi perbaikan dengan tujuan dapat berjalannya sistem penjualan secara efektif dan efisien.

4.1.1. Analisis terhadap penerapan bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, sebagai berikut:

Pada sistem penjualan yang diterapkan PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota melibatkan bagian – bagian didalam sistem penjualan tenaga listrik paskabayar tersebut, bagian yang terkait adalah meliputi bagian pembacaan meter, bagian transaksi energi, bagian pelayanan dan administrasi, bagian pengiriman, serta bagian penyambungan dan pemutusan. Pada bagian yang terkait dalam sistem penjualan tenaga listrik paskabayar telah melakukan kewajiban sesuai jobdesk nya masing – masing. Namun ditemui terdapat suatu ketidaksesuaian fungsi pada bagian pelayanan pelanggan dan administrasi bahwa bagian tersebut tidak berdiri sendiri. Bagian administrasi memiliki fungsi sebagai pencatatan yang berkaitan dengan rincian biaya operasional dan pengajuan anggaran menjadi satu fungsi dengan bagian pelayanan pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan adanya perangkapan tugas, sehingga perlu adanya sdm yang memahami kedua bidang dan mampu menjalankannya secara bersamaan agar penjualan tenaga listrik paskabayar berjalan secara efektif.

4.1.2. Analisis terhadap penerapan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, sebagai berikut:

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai dokumen yang digunakan dalam penerapan sistem penjualan tenaga listrik

paskabayar tersebut sudah mampu mendukung proses penjualan tenaga listrik paskabayar, sehingga dapat dikatakan baik dan telah memenuhi kebutuhan sistem penjualan tenaga listrik paskabayar pada PT.PLN (Persero) Rayon Kediri Kota tersebut. Namun, pada proses pembacaan meter yang dilakukan oleh petugas PLN dilakukan secara online dengan menggunakan ACMT (aplikasi Catat Meter Terpadu) yang dihubungkan ke AP2T (Aplikasi pelayanan pelanggan Terpusat), sehingga tidak adanya dokumen atau catatan secara manual mengenai hasil dari besar pasokan listrik yang dikonsumsi pelanggan paskabayar. Dalam hal ini perusahaan sebaiknya perlu menerbitkan faktur yang ditanggungjawabkan kepada petugas PLN sebagai alat perekam catatan secara manual agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan meter sehingga perusahaan dapat menjaga ketelitian atas angka dari jumlah pasokan listrik yang dikeluarkan perusahaan dengan jumlah yang seharusnya menjadi pendapatan yang diterima perusahaan melalui pengkoreksian ulang pembacaan meter.

4.1.3. Analisis terhadap penerapan prosedur yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayo Kediri Kota, sebagai berikut:

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada prosedur penjualan tenaga listrik paskabayar yang diterapkan PT.PLN (Persero) Rayon Kediri Kota sudah memiliki sistem dan prosedur yang baik. Namun, pada bagian bagian yang terkait penjualan tenaga listrik paskabayar perlu adanya perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif, khususnya pada bagian Pembacaan Pelanggan untuk menerbitkan catatan manual sehingga perlu adanya penambahan prosedur yaitu petugas PLN mencatat hasil pembacaan meter. Berikut akan dijabarkan prosedur perbaikan pada sistem penjualan tenaga listrik paskabayar, yaitu:

- i. Prosedur dimulai dari petugas PLN (mitra kerja) yang datang kerumah pelanggan melakukan pembacaan meter.
- ii. Kemudian petugas PLN menginput hasil pembacaan meter pada ACMT (Aplikasi Catat Meter Terpusat) dan melakukan pencatatan hasil pembacaan meter secara manual pada dokumen pencatatan meter sejumlah 2 rangkap, lembar pertama diberikan bagian TE dan lembar kedua disimpan sebagai arsip oleh petugas PLN. Proses Pencatatan meter dilakukan untuk melaporkan besar pasokan

listrik yang telah dikonsumsi pelanggan paskabayar.

- iii. Setelah itu, bagian Transaksi Energi menerima informasi berdasarkan hasil pembacaan meter melalui AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) dan menerima dokumen hasil pembacaan meter.
- iv. Bagian Transaksi Energi menghitung besar jumlah rekening yang harus ditagihkan pelanggan sesuai dengan jumlah pengkonsumsian melalui aplikasi tersebut.
- v. Setelah proses kalkulasi tagihan pelanggan, bagian ini melakukan otorisasi secara online melalui AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu) pada tanggal 1-5.
- vi. Kemudian, bagian Pelayanan pelanggan dan administrasi membuat daftar pengiriman rekening listrik dan menerbitkan dokumen TUL VI-01 sebanyak 4 rangkap berupa :
 - a) Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik.
 - b) Perintah Pemutusan Listrik Sementara Sambungan Listrik.
 - c) Perintah Penyambungan Kembali Sambungan Tenaga Listrik.
 - d) Penyelesaian Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik.
- vii. TUL VI-01 diberikan masing masing satu lembar, lembar pertama sebagai tembusan untuk pelanggan, lembar kedua dan ke empat diberikan pada bagian pelayanan pelanggan untuk di arsip dan lembar ketiga untuk petugas PLN.
- viii. Petugas PLN kerumah Pelanggan untuk memberikan dokumen TUL VI-01 Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang mengharuskan pelanggan melakukan pembayaran ke tempat pembayaran.
- ix. Pelanggan melakukan proses pembayaran rekening listrik paskabayar pada tempat pembayaran PPOB (*Payment Point Online Bank*).
- x. Kemudian surat pemberitahuan pemutusan sementara sambungan listrik diserahkan ke bagian pengiriman untuk diberikan kerumah pelanggan tenaga listrik paskabayar sebagai surat peringatan agar segera melakukan pembayaran.
- xi. Apabila tidak ada pembayaran sampai melewati tgl 20 pada bulan ketiga, maka bagian pelayanan pelanggan dan administrasi menerbitkan TUL VI-03 sebanyak 4 rangkap, berupa surat Pemberitahuan Pelaksanaan

Pemutusan Rampung Sambungan Tenaga Listrik.

- xii. Lembar pertama untuk pelanggan yang diberikan melalui bagian pengiriman, lembar kedua dan ketiga digunakan sebagai arsip perusahaan, lembar ketiga digunakan sebagai perintah kerja terhadap petugas PLN untuk melakukan bongkar rampung.
- xiii. Petugas PLN melakukan bongkar rampung sambungan listrik pada rumah pelanggan dengan melampirkan satu lembar TUL VI-03 Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan Tenaga Listrik yang mengharuskan pelanggan melunasi pembayaran tunggakan pada bulan sebelumnya.

4.2. Analisis dan Interpretasi data atas Sistem Penerimaan Kas tenaga listrik paskabayar (reguler) pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota.

Berdasarkan analisis atas data yang diperoleh mengenai sistem penerimaan tenaga listrik paskabayar yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota perlu adanya kontribusi perbaikan dengan tujuan dapat berjalannya sistem penjualan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari adanya sistem tersebut adalah untuk mendukung prosedur prosedur yang terlibat dalam proses penerimaan kas pada perusahaan.

4.2.1. Analisis terhadap penerapan bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, sebagai berikut:

Pada Penerimaan kas yang diterapkan PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota melibatkan hanya melibatkan satu bagian yang terkait yaitu diantaranya, bagian transaksi energi. Pada proses penerimaan kas, bagian tersebut saling terhubung dengan AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat) sebagai aplikasi pendukung pelaksanaan penerimaan kas dari penjualan listrik paskabayar tersebut. bagian yang terkait dengan sistem penerimaan kas yang berlaku dalam perusahaan tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan proses penerimaan kas. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas yang berjalan secara efektif sehingga bagian yang terkait mampu menjalankan tanggungjawab mengenai hak dan kewajibannya masing – masing. Namun perlu adanya perbaikan agar

sistem dan prosedur penerimaan kas atas penjualan tenaga listrik paskabayar berjalan lebih efektif. Perbaikan yang disarankan adalah dengan memperdayakan bagian administrasi untuk menerbitkan catatan pendukung secara manual.

4.2.2. Analisis terhadap penerapan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, sebagai berikut:

Untuk mencapai sistem penerimaan kas yang berjalan efektif dan efisien peran dokumen diperlukan dalam mendukung pelaksanaannya. Dokumen yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan sistem penerimaan kas sebagai alat perekam terjadinya transaksi penerimaan kas yang dilaksanakan pada bidang yang terkait. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan sistem penerimaan kas pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota masih perlu adanya perbaikan pada dokumen tersebut yaitu seluruh aktivitas dilakukan secara komputerisasi sehingga tidak adanya dokumen atau catatan pendukung yang menjadi arsip didalam internal perusahaan. Perbaikan yang disarankan adalah dengan menerbitkan dokumen atau catatan berupa rekapan kalkulasi pendapatan yang diterima PT. PLN (Persero) pada setiap bulannya. Perbaikan tersebut disarankan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan atau *error* pada sistem aplikasi pendukung penerimaan kas pada perusahaan.

4.2.3. Analisis terhadap penerapan prosedur yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota, pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas sudah baik karna melibatkan lebih dari satu prosedur yaitu prosedur penerimaan kas dan prosedur pencatatan penerimaan kas. Perbaikan yang disarankan agar sistem dan prosedur penerimaan kas berjalan secara efisien dan efektif yaitu pada proses pengiriman dokumen sebaiknya dilakukan secara online dan manual sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan pencatatan. Berikut akan dijabarkan mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas yang disarankan:

- i. Prosedur tersebut dimulai dari pelanggan membayar tagihan tenaga listrik paskabayar melalui PPOB (*Payment Point Online Bank*) sesuai dengan jumlah pengkonsumsian.
- ii. Setelah itu PPOB akan memproses transaksi pembayaran pelanggan paskabayar secara online dengan menghubungkan pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota.
- iii. PPOB memberikan bukti pembayaran listrik paskabayar kepada pelanggan.
- iv. Bagian transaksi energi menerima data pelunasan dari pelanggan untuk di otorisasi pada setiap bulannya melalui AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat).
- v. Apabila totalnya sudah sesuai, staff transaksi energi tersebut membuat memo jurnal melalui AP2T (Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu) dan menerbitkan TUL VI III – 09 untuk di arsip pada arsip komputer.
- vi. Memo jurnal tersebut berupa rincian penerimaan pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembayaran tagihan pelanggan paskabayar dan selanjutnya diupload hingga terhubung pada PLN Pusat.
- vii. Manajer Rayon berwenang untuk mengotorisasi memo jurnal yang telah valid, selanjutnya diupload hingga terhubung pada PLN Pusat.
- viii. Bagian administrasi menerima data pelanggan dan membuat rekapitulasi berupa rekapan kalkulasi pendapatan pada setiap bulannya.
- ix. Dokumen rekapitulasi pendapatan diterbitkan digunakan sebagai arsip perusahaan.

4.3. Analisis dan Interpretasi data atas Pengendalian Intern pada sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota.

4.3.1. Organisasi atau Bagian yang terkait.

Struktur organisasi didalam perusahaan berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Dimana struktur organisasi ini menjadi alat yang digunakan perusahaan sebagai pemisah tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan hak dan kewajiban pada bagian bagian yang terkait dalam suatu sistem. Sehingga, berjalannya kegiatan pokok perusahaan dipengaruhi oleh keefektifan pelaksanaan struktur organisasi.

Analisis struktur organisasi yang diterapkan PT.PLN (Persero) Rayon Kediri Kota adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Penjualan.

Berdasarkan data yang diperoleh dan penelitian yang telah dilakukan pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota terhadap sistem dan prosedur penjualan tenaga listrik paskabayar sudah baik, adanya struktur prosedur yang baik di dalam sistem penjualan tenaga listrik paskabayar (Reguler) ditandai oleh pemisahan tugas dan wewenang sesuai dengan tanggungjawabnya masing masing yaitu pemisahan fungsi – fungsi yang terkait dalam penjualan. Pemisahan tugas bertujuan untuk memberikan tanggung jawab sesuai porsi dan kapasitas SDM (sumber daya manusia), agar melaksanakan tugas secara maksimal.

2. Sistem Penerimaan Kas.

Pengendalian intern pada struktur organisasi yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota terhadap sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tenaga listrik paskabayarsudah berjalan secara efektif. Berdasarkan penelitian pada setiap bagian yang terkait sistem penerimaan kas telah menjalankan kebijakan sesuai dengan kapasitas bebannya masing – masing, dimana pada struktur organisasi PT.PLN (ersero) telah mampu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan suatu fungsi tanpa adanya perangkapan tugas. Pengendalian internal terhadap struktur organisasi adalah sebagai pemisah tugas secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unityang dibentuk. Berikut adalah struktur oganisasi pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota yang terlibat pada sistem penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik Paskabayar (Reguler).

4.3.2. Sistem Otorisasi dan prosedur pencatatan

1. Sistem Akuntansi Penjualan

Sistem dan prosedur penjualan Tenaga Listrik Paskabayar yaitu dilakukan secara kredit yang menimbulkan piutang terhadap perusahaan dari pembayaran yang dilakukan pelanggan paskabayar melalui jasa PPOB (*Payment Point Online Bank*). Piutang tersebut akan ditagihkan setelah tanggal 20 sesuai dengan besar pengkonsumsian energi listrik pada pemakaian selama 1 bulan. Pengendalian Internal pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan dilakukan oleh bagian pelayanan pelanggan dan administrasi dengan menerbitkan dokumen dokumen pengiriman rekening yang ditujukan kepada

pelanggan paskabayar agar segera melakukan pembayaran. Kemudian pembayaran dilakukan melalui jasa PPOB dan diotorisasi oleh bagian transaksi energi untuk memastikan adanya tunggakan dengan dilakukan pengawasan oleh manajer rayon.

2. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Pengendalian intern pada penerapan sistem otorisasi dan pencatatan prosedur penerimaan kas oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota adalah pembayaran tagihan rekening tenaga listrik paskabayar yang dilakukan pelanggan menggunakan jasa dari PPOB (*Payment Point Online Bank*). Besar tagihan yang dibebankan pelanggan paska bayar adalah sesuai dengan besar jumlah tagihan pada bukti pembayaran yang langsung diterbitkan PPOB (*Payment Point Online Bank*) sebagai kwitansi pembayaran.

4.3.3. Praktek yang sehat.

1. Sistem Akuntansi Penjualan.

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, pada praktek sehat yang berlaku di PT. PLN (Persero) masih ada kelemahan yaitu pada bagian pembacaan meter yang dilakukan oleh petugas PLN tidak adanya catatan secara manual. Bagian pembacaan meter menggunakan aplikasi pembacaan meter secara online sehingga tidak terdapat catatan yang mendukung hasil pembacaan meter tersebut. Hal ini akan menyebabkan kurangnya ketelitian dan memungkinkan kesalahan dalam penulisan angka kwh yang dikonsumsi.

Selain itu, pada praktek yang sehat yang berlaku di perusahaan tersebut terdapat kurangnya pengendalian internal yang dilakukan untuk meminimalisir adanya penunggakan bulan ketiga sehingga menyebabkan terjadinya sanksi berupa bongkar rampung atau pengambilan MCB, sehingga status pelanggan dinyatakan bukan lagi sebagai pelanggan dan harus melunasi tunggakan selama 3 bulan apabila melakukan proses pasang baru kembali. Untuk menanggulangi hal tersebut sebaiknya pada tunggakan bulan kedua bagian pelayanan pelanggan membuat surat peringatan tunggakan agar segera melakukan pembayaran melalui jasa PPOB (*Payment Point Bank*).

2. Sistem Akuntansi Penerimaan kas.

Analisis terhadap praktek yang sehat yang berlaku pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota yaitu seluruh kegiatan penerimaan kas dilakukan secara terkomputerisasi sehingga tidak adanya catatan secara manual diterbitkan sebagai arsip perusahaan. Sebaiknya catatan berupa rekapitulasi pendapatan dibuat oleh bagian administrasi tujuannya adalah untuk catatan pendukung yang

digunakan untuk menjamin angka pendapatan atau jumlah penerimaan kas. Selain itu, pada sistem informasi penerimaan kas diperlukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh auditor perusahaan sebagai pengendalian intern perusahaan.

4.3.4. Pegawai yang Cakap

1. Sistem Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas

Berdasarkan pada analisis yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota mengenai pegawai yang terlibat dalam sistem penjualan tenaga listrik paskabayar dan sistem penerimaan kas sudah memiliki pegawai yang cakap dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Selain itu pegawai yang terlibat dalam sistem penjualan dan sistem penerimaan kas paskabayar tersebut telah memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai bidangnya masing-masing. Hal ini dapat terlihat dari terselesainya segala tanggungjawab yang diberikan atasan secara tepat waktu. PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota. Standar pendidikan yang diterapkan PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota yang berkaitan dengan sistem penjualan dan penerimaan kas tersebut adalah minimal D3 yang kemudian di seleksi melalui tes dan diadakan pelatihan sesuai pada bidangnya masing – masing.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik paskabayar (reguler) yang telah diterapkan pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota masih memiliki beberapa kelemahan yang terjadi pada bagian yang terkait dalam sistem tersebut masih terdapat kelemahan – kelemahan yang mempengaruhi keefektifitasan pengendalian intern di dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan yang terdapat pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota:

- a) Pada pelaksanaan pembacaan meter hanya dilakukan secara online yaitu melalui pencatatan aplikasi ACMT, sehingga tidak terdapat catatan atau dokumen yang mendukung pelaksanaan pencatatan meter tersebut, sehingga akan memungkinkan kesalahan teknis dalam penulisan kwh meter yang dikonsumsi pelanggan.
- b) Sistem dan prosedur penerimaan kas tenaga listrik paskabayar secara keseluruhan dilakukan terkomputerisasi melalui online,

- sehingga tidak adanya catatan secara manual yang digunakan sebagai arsip perusahaan
2. Sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas tenaga listrik paskabayar (Reguler) di dalam perusahaan telah mendukung pelaksanaan pengendalian intern perusahaan pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota. Pelaksanaan sistem dan prosedur

5.2. Saran

- 1) Pada bagian pencatatan meter yang dilakukan oleh Petugas PLN, seharusnya dibuatkan catatan hasil pembacaan meter secara manual sesuai dengan besar konsumsi energi listrik yang dilakukan pelanggan paskabayar. Adanya catatan hasil pembacaan meter sebagai alat perekam catatan secara manual ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan menjadi catatan pendukung dalam pencatatan akuntansi yang telah dibuat dan menghindari kesalahan dalam pembacaan meter, sehingga perusahaan dapat menjaga ketelitian atas angka dari jumlah yang seharusnya menjadi pendapatan bagi perusahaan.
- 2) Pada sistem penerimaan kas sebaiknya hanya dilakukan melalui dua metode yaitu secara online dan manual. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menjamin angka penerimaan kas, sehingga mampu meminimalisir adanya kesalahan jumlah penerimaan kas.
- 3) Pada sistem dan prosedur penerimaan kas, perlu adanya pemeriksaan keuangan secara rutin yang dilakukan oleh auditor dari kantor pusat sehingga terdapat pengendalian intern yang dilakukan perusahaan. Pengawasan intern ini dilakukan untuk mendukung keberlangsungan kinerja pada PT. PLN (Persero) Rayon Kediri Kota agar masyarakat melakukan migrasi kWh meter paskabayar (reguler) ke prabayar (token), sehingga mampu mengurangi jumlah susut pasokan listrik terhadap perusahaan.
- 4) Memperluas sosialisasi serta menghimbau masyarakat mengenai listrik prabayar (token). Tujuannya adalah sebagai sosialisasi dari kerugian yang disebabkan faktor teknis dan nonteknis pada penjualan tenaga listrik paskabayar
- 5) Mempertahankan kualitas kinerja pada masing-masing pegawai PT. PLN (Persero) melalui pelatihan kepemimpinan dan refreshing untuk mengurangi tingkan kejenuhan dalam menjalankan tanggungjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi Kelima*. Yogyakarta: BPFE
- Krismiaji. 2010. *Sistem Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2016. *Sistem Akuntansi Edisi Empat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Puspitawati, Lilis, dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ranatarisza, Mirza & Max Advian Noor. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi pada aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang: UB press.
- Wardani, Winda K. 2014. Analisis Sistem dan Prosedur Penjualan dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Anugerah Cendrawasih Sakti Motor Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis UB*. Vol. 12 No. 1 (diakses tanggal 12 Desember 2016)
- Internet :
- (<http://www.pln.co.id/ntb/?p=108>). (diakses pada tanggal 23-11-2016)
- <http://prokum.esdm.go.id/permen/2012/Permen%20ESDM%2030%202012.pdf>. (diakses pada tanggal 15-12-2016)